

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banyumas dengan menggunakan perspektif ekonomi politik kelembagaan dari Douglas North (1990). Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus di SD Negeri 2 Purwokerto Lor. Data diperoleh dari 15 informan yang terdiri atas kepala sekolah, guru, orang tua, siswa, serta penyedia makanan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah dijalankan sesuai prosedur dengan dukungan 219 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi jangkauannya masih terbatas, yakni hanya mencakup 11,23% sekolah dasar dan 18,32% siswa. Permasalahan utama yang ditemukan meliputi keterlambatan distribusi, keterbatasan sarana, serta penurunan kualitas makanan akibat keterikatan anggaran yang kaku (Rp8.000/porsi). Selain itu, struktur kelembagaan yang bersifat terpusat membatasi keterlibatan pihak sekolah, sehingga memunculkan ketegangan antara institusi formal (kebijakan pusat) dan institusi informal (penyesuaian di tingkat lokal). Para aktor lokal cenderung menerima program secara pragmatis: guru memandangnya sebagai kewajiban, orang tua sebagai bentuk bantuan, dan siswa sebagai manfaat langsung. Kondisi ini menciptakan hubungan yang tidak seimbang antara negara dan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi kelembagaan yang mampu menyelaraskan insentif, memperluas partisipasi lokal, serta mengedepankan pendekatan berbasis hak guna menjamin keberlanjutan program.

Kata Kunci: Program Makan Bergizi Gratis, ekonomi politik institusional, implementasi kebijakan, Kabupaten Banyumas, institusi formal-Informal

ABSTRACT

This research examines the implementation of the Free Nutritious Meal Program (MBG) in Banyumas Regency through the lens of Douglas North's (1990) institutional political economy. A qualitative case study design was applied at SD Negeri 2 Purwokerto Lor. Data were gathered from 15 informants, including the principal, teachers, parents, students, and food providers, using observation, interviews, and documentation, and were analyzed with the interactive model of Miles and Huberman. The results indicate that the program has been carried out procedurally with the support of 219 Nutritious Fulfillment Service Units (SPPG), yet its coverage remains limited, reaching only 11.23% of primary schools and 18.32% of students. Key challenges identified include delays in distribution, limited facilities, and declining food quality due to inflexible budgeting (Rp8,000 per portion). Furthermore, the centralized institutional arrangement constrains school involvement, leading to tensions between formal institutions (central policies) and informal practices (local adjustments). Local actors tend to respond pragmatically: teachers perceive it as an obligation, parents as assistance, and students as a direct benefit. This situation contributes to an imbalanced relationship between the state and society. Accordingly, the study highlights the need for institutional reforms that align incentives, enhance local participation, and adopt a rights-based approach to sustain the program in the long term.

Keywords: *Free Nutritious Meal Program, institutional political economy, policy implementation, Banyumas Regency, formal-informal institutions*

